

**PELAKSANAAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)
DI PT PELITA CITRA MANDIRI SELAKU VENDOR
PADA PT. PLN (PERSERO) RAYON CIAMIS**

DODI SUWONDO

suwondododi@gmail.com

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Galuh

2018

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan yang berkaitan dengan belum optimalnya pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT Pelita Citra Mandiri selaku vendor pada PT PLN (Persero) Rayon Ciamis. Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka peneliti mencoba mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) ?; 2) Bagaimana hambatan-hambatan Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) ?; 3) Bagaimana upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) ?

Dalam penelitian ini penulis memakai metode deskriptif dengan cara menggambarkan keadaan objek penelitian. Informan dalam penelitian ini sebanyak 10 orang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan dengan cara observasi, dan wawancara.

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian maka penulis menyimpulkan sebagai berikut : 1) Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) belum dilaksanakan dengan baik sesuai dengan pendapat menurut Mathis dan Jackson (2009:58) terkait dengan beberapa aspek dalam program keselamatan dan kesehatan kerja . 2) Hambatan-hambatan Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) seperti masih kurangnya kesadaran pegawai dalam melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja sehingga masih adanya pegawai yang tidak menggunakan perlengkapan kerja, keterbatasan anggaran yang dimiliki perusahaan sehingga belum dapat menjamin semua pegawai dalam memperoleh jaminan keselamatan dan kesehatan kerja, masih kurangnya kerjasama yang terjalin antara perusahaan dengan pegawai dalam melaksanakan program K3. 3) Upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di PT Pelita Citra Mandiri selaku vendor pada PT PLN (Persero) Rayon Ciamis seperti meningkatkan kesadaran pegawai dalam melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja sehingga pegawai dapat menggunakan perlengkapan kerja, mengoptimalkan anggaran yang dimiliki perusahaan.

Kata Kunci: *Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)*

A. PENDAHULUAN

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan rencana yang berguna untuk mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja. Karena menimbulkan kerugian bagi karyawan maupun perusahaan yang bersangkutan, apabila banyak terjadi kecelakaan kerja, maka akan banyak karyawan yang menderita, tingkat absensi meningkat, produktivitas menurun, dan bahkan akibat terburuk karyawan terpaksa berhenti bekerja karena cacat fisik dan perusahaan kehilangan karyawannya. Salah satu cara untuk menyadarkan karyawan tentang pentingnya

keselamatan dan kesehatan kerja adalah dengan adanya penyuluhan dan pembinaan mengenai pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja memiliki tujuan, yaitu meningkatkan produktivitas, meningkatkan efisiensi pekerjaan dan menurunkan biaya kesehatan.

Keselamatan kerja telah menjadi perhatian di kalangan pemerintah dan bisnis sejak lama. Faktor keselamatan kerja menjadi penting karena sangat terkait dengan kinerja karyawan dan pada kinerja perusahaan. Semakin tersedianya fasilitas keselamatan kerja semakin sedikit kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja. Maka dari itu sangat penting bagi sebuah perusahaan untuk

menyediakan fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja.

Menurut Sanjaya (2012:1), menyatakan bahwa : Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan suatu permasalahan yang banyak menyita perhatian berbagai organisasi saat ini karena mencakup permasalahan segi perikemanusiaan, biaya dan manfaat ekonomi, aspek hukum, pertanggungjawaban serta citra organisasi itu sendiri. Semua hal tersebut mempunyai tingkat kepentingan yang sama besarnya walaupun di sana sini memang terjadi perubahan perilaku, baik didalam lingkungan sendiri maupun faktor lain yang masuk dari unsur eksternal industri.

Oleh karena itu maka pemerintah mengeluarkan kebijakan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dinyatakan bahwa upaya kesehatan dan keselamatan kerja (K3) harus diselenggarakan di semua tempat kerja khususnya tempat kerja yang mempunyai resiko bahaya kesehatan, mudah terjangkau penyakit atau mempunyai karyawan paling sedikit 10 orang. Dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.05/MEN/1996 tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja telah diatur khusus pelaksanaan K3 dalam suatu sistem yang disebut sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3). Kemudian pada pasal 3 Permenaker tersebut dinyatakan bahwa setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 100 orang atau lebih dan atau mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses atau bahan produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, peledakan, kebakaran, dan pencemaran wajib menerapkan SMK3.

PT PLN (Persero) Rayon Ciamis adalah sebagai salah satu BUMN yang bergerak dalam bisnis ketenagalistrikan nasional juga tidak luput dari tuntutan untuk dapat memberikan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja bagi seluruh karyawannya.

Adanya sebuah sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang profesional akan dapat menumbuhkan rasa aman

bagi seluruh karyawan pada saat mereka bekerja. Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang ada PT PLN (Persero) secara umum mengacu kepada sistem keselamatan ketenagalistrikan atau yang dikenal dengan istilah K2. Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) adalah segala upaya atau langkah-langkah pengamanan instalasi tenaga listrik dan pengamanan pemanfaat tenaga listrik untuk mewujudkan kondisi andal bagi instalasi dan kondisi aman dari bahaya bagi manusia, serta kondisi akrab lingkungan (ramah lingkungan), dalam arti tidak merusak lingkungan hidup disekitar instalasi tenaga listrik.

Dalam melaksanakan usaha ketenagalistrikan PT PLN (Persero) melakukan kerjasama dengan vendor sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Adapun dalam penelitian ini vendor yang diteliti adalah PT Pelita Citra Mandiri yang bertugas di bidang teknik/pelayanan, pemeliharaan dan sopir. Dimana dalam pelaksanaan tugasnya sangat rentan terjadinya kecelakaan sehingga penulis tertarik melakukan penelitian di perusahaan tersebut.

Hal tersebut sejalan dengan hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa belum optimalnya pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT Pelita Citra Mandiri selaku vendor pada PT PLN (Persero) Rayon Ciamis, hal tersebut dibuktikan dengan beberapa indikator permasalahan sebagai berikut :

1. Masih adanya kejadian pegawai lapangan yang tergelincir pada saat perbaikan pembangkit hal ini dikarenakan pegawai tidak memakai alat-alat safety saat bekerja, Seperti : masih terdapat pegawai yang tidak disiplin pada saat bekerja dengan tidak melengkapi diri dari pelindung diri.
2. Masih adanya pegawai yang tidak mematuhi prosedur keselamatan dan kesehatan dalam bekerja sehingga mengabaikan ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan. Seperti pegawai tidak mematuhi Standard Operation Procedure (SOP) yang tertuang dalam Buku Panduan Keselamatan Ketenagalistrikan PT PLN (Persero) terkait dengan pelaksanaan sistem keselamatan dan kesehatan kerja.
3. Supervisor sebagai penanggungjawab dan koordinator yang ikut bekerja di lapangan kurang sering mengingatkan akan pentingnya peralatan keselamatan untuk digunakan demi mengantisipasi kecelakaan kerja yang memang sangat tidak diinginkan, baik oleh pekerja itu sendiri maupun oleh perusahaan. Seperti masih kurangnya supervisor mengawasi pegawai lapangan setiap hari

dalam pemakaian alat-alat keamanan dalam bekerja sehingga rentan terjadinya kecelakaan.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja ini, karyawan akan merasa aman, terlindungi dan terjamin keselamatannya, sehingga diharapkan dapat mencapai efisiensi baik dari segi biaya, waktu dan tenaga serta dapat meningkatkan kinerja karyawan.

Berdasarkan pada uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT Pelita Citra Mandiri selaku vendor pada PT PLN (Persero) Rayon Ciamis”**.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis dapat merumuskan permasalahannya, sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT Pelita Citra Mandiri selaku vendor pada PT PLN (Persero) Rayon Ciamis ?
2. Bagaimana hambatan-hambatan Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT Pelita Citra Mandiri selaku vendor pada PT PLN (Persero) Rayon Ciamis ?
3. Bagaimana upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT Pelita Citra Mandiri selaku vendor pada PT PLN (Persero) Rayon Ciamis ?

B. LANDASAN TEORITIS

Kesehatan dan Keselamatan Kerja merupakan hal yang wajib diperhatikan oleh semua pihak di dalam suatu perusahaan. Pelaksanaan program ini adalah sebagai upaya dalam melindungi karyawan dari resiko bahaya pekerjaan serta dampak yang ditimbulkannya. Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan salah satu faktor yang menunjang dalam meningkatkan produktivitas perusahaan maupun kesejahteraan karyawannya.

Menurut Rivai, (2014:576) menyatakan bahwa : Kesehatan dan keselamatan kerja menunjuk kepada kondisi-kondisi fisiologis-fisikal psikologis tenaga kerja yang di akibatkan oleh lingkungan kerja yang di sediakan oleh pengusaha jika sebuah perusahaan melaksanakan tindakan-tindakan kesehatan dan keselamatan yang efektif maka lebih sedikit pekerja yang menderita cedera atau penyakit jangka pendek maupun panjang sebagai akibat dari pekerjaan mereka di perusahaan tersebut.

Menurut Widodo (2015:234), “Kesehatan dan keselamatan kerja (K3) adalah bidang yang terkait dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja di sebuah institusi maupun lokasi proyek

Dengan demikian dapat diketahui bahwa keselamatan dan kesehatan kerja merupakan proses perlindungan pekerja dalam kegiatan yang dilakukan pekerja pada suatu perusahaan atau tempat kerja yang menyangkut risiko baik jasmani dan rohani para pekerja. Perlindungan bagi pekerja merupakan kewajiban perusahaan demi menjaga lingkungan dan mencegah terjadinya kecelakaan kerja.

Oleh karena itu menurut Mathis dan Jackson (2009:58) menyatakan bahwa terdapat beberapa aspek dalam program keselamatan dan kesehatan kerja antara lain :

1. Tanggung jawab kesehatan, keselamatan dan keamanan
2. Komitmen dan Budaya Keselamatan Organisasi
3. Komite – komite keselamatan
4. Pelatihan keselamatan dan komunikasi
5. Motivasi Keselamatan karyawan dan Insentif
6. Inspeksi, investigasi kecelakaan, dan evaluasi

Dengan demikian program keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu upaya perlindungan yang diajukan kepada semua potensi yang dapat menimbulkan bahaya baik jasmani maupun rohani tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan akibat kerja yang dapat mengakibatkan karyawan menderita luka maupun menyebabkan penyakit di tempat kerja dengan mematuhi atau taat pada hukum dan aturan di tempat kerja.

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini sebanyak 10 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data kualitatif dalam penelitian ini yaitu : reduksi data, penyajian data, keabsahan data.

D. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

1. Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT Pelita Citra Mandiri selaku vendor pada PT PLN (Persero) Rayon Ciamis.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui adanya ketidaksesuaian antara hasil penelitian

dengan teori yang dijadikan pedoman oleh peneliti terkait dengan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di PT Pelita Citra Mandiri selaku vendor pada PT PLN (Persero) Rayon Ciamis yang antara lain sebagai berikut:

1. Tanggung jawab kesehatan, keselamatan dan keamanan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perusahaan belum sepenuhnya memiliki tanggungjawab dalam memberikan jaminan keselamatan dan kesehatan bagi pegawai dalam bekerja, hal ini dikarenakan masih kurangnya perusahaan pemberi kerja mengikutsertakan pegawai dalam program BPJS ketenagakerjaan sehingga perusahaan kesulitan apabila terdapat pegawai yang mengalami kecelakaan dan tidak memiliki kartu BPJS ketenagakerjaan, selain itu keterbatasan anggaran yang dimiliki untuk menyediakan berbagai peralatan keselamatan kerja yang memadai sehingga belum dapat mencegah, mengurangi, dan meminimumkan kemungkinan terjadinya kecelakaan dalam pekerjaan secara optimal serta kurangnya dilakukan pengawasan terhadap proses kerja pegawai sehingga menyebabkan pekerjaan yang harus diselesaikan tidak tercapai.

2. Komitmen dan Budaya Keselamatan Organisasi

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja diketahui bahwa perusahaan belum memiliki komitmen dan budaya keselamatan organisasi hal ini dikarenakan ketersediaan jumlah pegawai yang belum memadai sehingga menyulitkan perusahaan dalam memberikan hukuman kepada pegawai yang ketahuan melanggar peraturan keselamatan dan kesehatan kerja, fasilitas pendukung yang disediakan perusahaan belum dapat membantu pegawai dalam memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan yang ditentukan, selain itu proses pelaksanaan penerapan program K3 pada perusahaan yang dilakukan dengan cara kerjasama antar tim dengan memantau kinerja K3 dilapangan belum melibatkan seluruh unsur yang ada didalam perusahaan dan tim P2K3.

3. Komite-komite keselamatan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja diketahui bahwa komite-komite keselamatan yang dibentuk perusahaan belum optimal dalam mengurangi resiko terjadinya kecelakaan kerja hal ini dibuktikan dengan komite kurang mengawasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pegawai secara rutin selain itu selain itu komite

keselamatan kerja belum mengumpulkan data untuk menyesuaikan situasi kerja aman dan selamat serta kurang memberi masukan-masukan kepada pihak perusahaan sehingga masing-masing bagian belum menjalankan prosedur kerja yang aman sesuai dengan tujuan dalam meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja, hasil evaluasi yang dilakukan oleh komite keselamatan dan kesehatan kerja belum dapat dilaksanakan hal ini dikarenakan kurangnya perusahaan memberikan dukungan kepada komite keselamatan dan kesehatan kerja sehingga belum optimal dalam melaksanakan evaluasi program yang dilaksanakan selain itu selama ini perusahaan kurang menindaklanjuti masukan yang disampaikan oleh komite keselamatan kerja terkait dengan program K3 yang telah dilaksanakan sehingga hasil temuan yang dilakukan belum dapat diperbaiki oleh perusahaan hal ini disebabkan adanya hambatan-hambatan komite karena komite kurang mendapatkan dukungan dari perusahaan dalam memperoleh data yang dibutuhkan.

4. Pelatihan keselamatan dan komunikasi

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja diketahui bahwa perusahaan belum optimal dalam melaksanakan pelatihan keselamatan dan komunikasi hal ini dibuktikan dengan adanya hambatan-hambatan perusahaan dalam menanamkan kebiasaan dan cara bekerja yang aman bagi semua pegawai hal ini disebabkan oleh belum dilakukannya pengawasan secara teratur untuk dapat memastikan bahwa faktor-faktor yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja dapat terdeteksi setiap saat serta kurangnya dilakukan pemeriksaan terhadap peralatan yang biasa digunakan sehingga belum dapat diketahui dengan cepat apabila ada peralatan yang rusak, selama ini adanya hambatan-hambatan pegawai dalam mengikuti berbagai kegiatan pelatihan yang dilaksanakan hal ini disebabkan kurangnya mensosialisasikan manfaat K3 bagi pegawai sehingga menyebabkan kurangnya pemahaman pegawai dalam menggunakan fasilitas keselamatan kerja karena kurangnya pegawai mengikuti kegiatan pelatihan selain itu masih kurangnya kesadaran pegawai dalam mengikuti kegiatan pelatihan dalam menggunakan fasilitas kerja sehingga pegawai belum dapat memahami berbagai prosedur dalam menggunakan peralatannya.

5. Motivasi keselamatan pegawai dan insentif

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja diketahui bahwa

perusahaan belum optimal dalam melaksanakan motivasi keselamatan pegawai, hal ini dikarenakan kurangnya perusahaan memberikan motivasi yang berbentuk insentif diberikan bagi pegawai yang mentaati ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan, masih adanya pegawai yang mengalami kecelakaan dalam bekerja karena tidak menggunakan perlengkapan keselamatan dalam bekerja dan perusahaan belum memberikan insentif kepada pegawai apabila dalam kurun waktu tertentu tidak terjadi kecelakaan dalam bekerja hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh perusahaan selain itu kurangnya kepala satuan kerja melaporkan pegawai yang tidak menggunakan alat atau perlengkapan keselamatan kerja pada saat melaksanakan tugasnya serta kurangnya perusahaan menyediakan perlengkapan keselamatan kerja bagi pegawai sehingga perusahaan kurang memberikan sanksi kepada pegawai yang tidak menggunakan perlengkapan keselamatan kerja.

6. Inspeksi, investigasi kecelakaan, dan evaluasi

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja diketahui bahwa perusahaan belum optimal dalam melaksanakan Inspeksi, investigasi kecelakaan, dan evaluasi hal ini dibuktikan dengan adanya permasalahan seperti masih kurangnya kurangnya pengawas memberikan masukan terkait hasil pengawasannya sehingga menyebabkan perusahaan belum dapat memberikan masukan-masukan kepada pegawai serta kurangnya dilakukan pengawasan secara rutin terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan dan masih adanya pegawai yang kurang memiliki kesadaran dalam bekerja sehingga kurang menggunakan perlengkapan keselamatan dalam bekerja selain itu masih adanya pegawai yang kurang memperhatikan penggunaan perlengkapan keselamatan kerja sehingga masih ada pegawai yang tidak menggunakan perlengkapan keselamatan kerja dalam bekerja.

2. Hambatan-hambatan Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT Pelita Citra Mandiri selaku vendor pada PT PLN (Persero) Rayon Ciamis

Berdasarkan hasil penelitian diketahui adanya hambatan-hambatan dalam pelaksanaan keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT Pelita Citra Mandiri selaku vendor pada PT PLN (Persero) Rayon Ciamis yang antara lain sebagai berikut :

1. Tanggung jawab kesehatan, keselamatan dan keamanan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa adanya hambatan-hambatan perusahaan untuk bertanggungjawab dalam memberikan jaminan keselamatan dan kesehatan bagi pegawai dalam bekerja hal ini dikarenakan masih kurangnya kesadaran pegawai untuk mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan sehingga perusahaan kesulitan apabila terdapat pegawai yang celaka karena tidak memiliki kartu BPJS ketenagakerjaan, selain itu banyaknya tenaga kontrak atau *outsourcing* menyebabkan banyaknya pegawai yang tidak mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan.

2. Komitmen dan Budaya Keselamatan Organisasi

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa adanya hambatan-hambatan dalam melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja, hal ini dikarenakan kurangnya ketersediaan jumlah pegawai yang memadai, serta kurangnya komitmen petugas dalam menggunakan fasilitas pendukung yang disediakan perusahaan, selain itu masih kurangnya keterlibatan seluruh unsur di dalam perusahaan dalam pelaksanaan penerapan program K3.

3. Komite-komite keselamatan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa adanya hambatan-hambatan dalam melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja karena kurangnya dukungan komite-komite keselamatan yang dibentuk perusahaan dalam mengurangi resiko terjadinya kecelakaan kerja hal ini dibuktikan dengan komite kurang mengawasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pegawai secara rutin selain itu komite keselamatan kerja belum memberi masukan-masukan kepada pihak perusahaan sehingga masing-masing bagian belum menjalankan prosedur kerja yang aman sesuai dengan tujuan dalam meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja, selain itu selama ini perusahaan kurang menindaklanjuti masukan yang disampaikan oleh komite keselamatan kerja terkait dengan program K3 yang telah dilaksanakan sehingga hasil temuan yang dilakukan belum dapat diperbaiki oleh perusahaan.

1. Pelatihan keselamatan dan komunikasi

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja diketahui bahwa adanya hambatan-hambatan perusahaan dalam melaksanakan pelatihan keselamatan dan komunikasi hal ini dikarenakan masih kurangnya

pemahaman pegawai dalam menggunakan fasilitas keselamatan kerja selain itu kurangnya keaktifan pegawai dalam mengikuti pengarahan terkait program keselamatan dan kesehatan kerja sehingga menyebabkan perusahaan kesulitan dalam membantu meningkatkan pemahaman pegawai.

2. Motivasi keselamatan pegawai dan insentif

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja diketahui bahwa adanya hambatan-hambatan perusahaan dalam memberikan motivasi keselamatan pegawai dan insentif hal ini dikarenakan masih kurangnya kesadaran pegawai dalam mentaati ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan sehingga masih adanya pegawai yang tidak menggunakan perlengkapan keselamatan dalam bekerja selain itu kurangnya kepala satuan kerja melaporkan pegawai yang tidak menggunakan alat atau perlengkapan keselamatan kerja pada saat melaksanakan tugasnya.

3. Inspeksi, investigasi kecelakaan, dan evaluasi

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja diketahui bahwa perusahaan mengalami hambatan-hambatan sehingga tidak dapat melaksanakan Inspeksi, investigasi kecelakaan, dan evaluasi dengan baik hal ini disebabkan oleh kurangnya pengawas memberikan masukan terkait hasil pengawasannya, kurangnya dilakukan pengawasan secara rutin terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan dan masih adanya pegawai yang kurang memiliki kesadaran dalam bekerja sehingga kurang menggunakan perlengkapan keselamatan dalam bekerja.

3. Upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT Pelita Citra Mandiri selaku vendor pada PT PLN (Persero) Rayon Ciamis

Berdasarkan hasil penelitian diketahui adanya hambatan-hambatan dalam pelaksanaan keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT Pelita Citra Mandiri selaku vendor pada PT PLN (Persero) Rayon Ciamis yang antara lain sebagai berikut :

1. Tanggung jawab kesehatan, keselamatan dan keamanan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa adanya upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan perusahaan untuk bertanggungjawab dalam memberikan jaminan keselamatan dan kesehatan bagi pegawai dalam bekerja hal ini dilakukan oleh perusahaan

dengan meningkatkan kesadaran pegawai untuk mengikuti program BPJS ketenagakerjaan sehingga dapat membantu kesulitan perusahaan apabila terdapat pegawai yang celaka dan meningkatkan keikutsertaan pegawai dalam mengikuti kegiatan pengarahan dalam menggunakan alat keselamatan kerja.

2. Komitmen dan Budaya Keselamatan Organisasi

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa adanya upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja diketahui bahwa upaya perusahaan dalam memiliki komitmen dan budaya keselamatan organisasi adalah dengan berupaya menyediakan fasilitas pendukung yang disediakan perusahaan sehingga dapat membantu pegawai dalam memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan yang ditentukan, selain itu perusahaan bekerjasama dengan dokter perusahaan untuk berjaga sehingga selalu siap di tempat untuk menangani pegawai yang mengalami gangguan kesehatan

3. Komite-komite keselamatan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa adanya upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja dengan meminta dukungan komite-komite keselamatan yang dibentuk perusahaan dalam mengurangi resiko terjadinya kecelakaan kerja hal ini dilakukan dengan upaya meminta komite keselamatan kerja yang dibentuk dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja dengan meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pegawai secara rutin selain itu komite keselamatan kerja diminta mengumpulkan data untuk menyesuaikan situasi kerja aman dan selamat serta memberi masukan-masukan kepada pihak perusahaan sehingga masing-masing bagian dapat menjalankan prosedur kerja yang aman sesuai dengan tujuan dalam meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja.

4. Pelatihan keselamatan dan komunikasi

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja diketahui bahwa adanya upaya-upaya yang dilaksanakan dalam melaksanakan pelatihan keselamatan dan komunikasi yaitu dengan berusaha menanamkan kebiasaan dan cara bekerja yang aman bagi semua pegawai dengan melakukan pengawasan secara teratur untuk dapat memastikan bahwa faktor-faktor yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja dapat terdeteksi

setiap saat serta dilakukan pemeriksaan terhadap peralatan yang biasa digunakan sehingga dapat diketahui dengan cepat apabila ada peralatan yang rusak.

5. Motivasi keselamatan pegawai dan insentif

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja diketahui bahwa adanya upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan perusahaan dalam memberikan motivasi keselamatan pegawai dan insentif hal ini dilakukan dengan upaya Meningkatkan kesadaran pegawai dalam mentaati ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan sehingga pegawai yang mengalami kecelakaan dalam bekerja dapat ditindaklanjuti dengan baik dan memberikan insentif kepada pegawai apabila dalam kurun waktu tertentu tidak terjadi kecelakaan dalam bekerja.

6. Inspeksi, investigasi kecelakaan, dan evaluasi

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja diketahui bahwa perusahaan berupaya mengatasi hambatan-hambatan dalam melaksanakan Inspeksi, investigasi kecelakaan, dan evaluasi yaitu dengan berusaha meminta pengawas memberikan masukan terkait hasil pengawasannya sehingga menyebabkan perusahaan dapat memberikan masukan-masukan kepada pegawai serta meminta dilakukan pengawasan secara rutin terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT Pelita Citra Mandiri selaku vendor pada PT PLN (Persero) Rayon Ciamis, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT Pelita Citra Mandiri selaku vendor pada PT PLN (Persero) Rayon Ciamis belum dilaksanakan sesuai dengan pendapat menurut Mathis dan Jackson (2009:58), karena terdapat beberapa aspek dalam program keselamatan dan kesehatan kerja yang belum dilaksanakan seperti masih kurangnya tanggungjawab perusahaan dalam melengkapi berbagai peralatan dan perlengkapan keselamatan kerja bagi pegawai, kurangnya pemberian hukuman terhadap pegawai yang melanggar ketentuan pelaksanaan program KG, keberadaan komite keselamatan kerja kurang memberikan masukan kepada perusahaan dalam

meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja, perusahaan kurang memberikan jaminan keselamatan kerja kepada pegawai karena jaminan keselamatan kerja di tanggung oleh BPJS ketenagakerjaan sedangkan tanggungjawab perusahaan masih kurang bagi pegawai yang mengalami kecelakaan serta kurangnya melakukan investigasi terhadap kejadian kecelakaan yang dialami oleh pegawai. Begitu pula berdasarkan hasil observasi penulis diketahui bahwa pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT Pelita Citra Mandiri selaku vendor pada PT PLN (Persero) Rayon Ciamis belum dilaksanakan dengan baik hal ini terlihat dari masih adanya pegawai yang kesulitan dalam memperoleh jaminan K3 karena perusahaan kurang memfasilitasi kepada pihak BPJS ketenagakerjaan dalam melakukan pengurusan asuransi kecelakaan, perusahaan kurang menyediakan peralatan dan perlengkapan keselamatan kerja yang biasa digunakan, pembentukan tim pengawas kurang mempertimbangkan kompetensi yang dibutuhkan serta komite keselamatan kerja kurang memiliki kemampuan dalam mengantisipasi terjadinya kecelakaan kerja dan kurangnya dilakukan investigasi secara menyeluruh terhadap kejadian kecelakaan yang dialami oleh pekerja.

2. Hambatan-hambatan pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT Pelita Citra Mandiri selaku vendor pada PT PLN (Persero) Rayon Ciamis seperti masih kurangnya kesadaran pegawai dalam melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja sehingga masih adanya pegawai yang tidak menggunakan perlengkapan kerja, keterbatasan anggaran yang dimiliki perusahaan sehingga belum dapat menjamin semua pegawai dalam memperoleh jaminan keselamatan dan kesehatan kerja, masih kurangnya kerjasama yang terjalin antara perusahaan dengan pegawai dalam melaksanakan program K3 sehingga permasalahan yang terjadi belum dapat diselesaikan. Begitu pula berdasarkan hasil observasi penulis diketahui bahwa hambatan-hambatan pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT Pelita Citra Mandiri selaku vendor pada PT PLN (Persero) Rayon Ciamis yang antara lain kurangnya perusahaan memberikan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja, masih kurangnya kesadaran pegawai dalam membantu melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja di dalam

perusahaan serta kurangnya kerjasama yang terjalin antara pengawas dan satuan kerja dengan perusahaan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja.

3. Hambatan-hambatan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di PT Pelita Citra Mandiri selaku vendor pada PT PLN (Persero) Rayon Ciamis seperti meningkatkan kesadaran pegawai dalam melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja sehingga pegawai dapat menggunakan perlengkapan kerja, mengoptimalkan anggaran yang dimiliki perusahaan sehingga dapat menjamin semua pegawai dalam memperoleh jaminan keselamatan dan kesehatan kerja, Meningkatkan kerjasama yang terjalin antara perusahaan dengan pegawai dalam melaksanakan program K3 sehingga permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan. Begitu pula berdasarkan hasil observasi penulis diketahui bahwa adanya upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT Pelita Citra Mandiri selaku vendor pada PT PLN (Persero) Rayon Ciamis yang antara lain perusahaan memberikan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja dengan membayar premi asuransi bagi semua pegawai sehingga semua pegawai dapat menikmati program BPJS Ketenagakerjaan, Meningkatkan kesadaran pegawai dalam membantu melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja di dalam perusahaan serta meningkatkan kerjasama yang terjalin antara pengawas dan satuan kerja dengan perusahaan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Perusahaan sebaiknya meningkatkan tanggungjawabnya dalam pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja dengan menyediakan berbagai peralatan dan perlengkapan keselamatan kerja bagi pegawai selain itu perusahaan meningkatkan pemberian jaminan keselamatan dan kesehatan kerja bagi semua pegawai sehingga pegawai merasa nyaman dan tenang dalam bekerja, selain itu sebaiknya perusahaan memberikan sanksi yang tegas kepada pegawai yang tidak menggunakan peralatan keselamatan kerja karena dapat

merugikan baik bagi individu pegawai maupun untuk perusahaan sendiri.

2. Untuk mengatasi berbagai hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja sebaiknya perusahaan meningkatkan kesadaran pegawai dalam bekerja sehingga dapat menggunakan peralatan keselamatan dalam bekerja serta perusahaan sebaiknya meningkatkan kerjasama dengan semua pegawai sehingga program keselamatan dan kesehatan kerja dapat dicapai.
3. Sebaiknya perusahaan melakukan upaya seperti perusahaan memberikan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja dengan membayar premi asuransi bagi semua pegawai sehingga semua pegawai dapat menikmati program BPJS Ketenagakerjaan, Meningkatkan kesadaran pegawai dalam membantu melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja di dalam perusahaan serta meningkatkan kerjasama yang terjalin antara pengawas dan satuan kerja dengan perusahaan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber buku :

- Mangkunegara. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Perusahaan. Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.
- Marwansyah. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung : Alfabeta.
- Moekijat. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Mandar Maju.
- Pasolong. 2013. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Salami, I.R.S, dkk. 2015. *Kesehatan Dan Keselamatan Lingkungan Kerja*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Sedarmayanti. 2011. *Tata Kerja dan Produktivitas Kerja : Suatu Tinjauan Dari Aspek Ergonomi Atau Kaitan Antara Manusia Dengan Lingkungan Kerjanya*. Cetakan Ketiga. Bandung: Mandar Maju.
- Suyadi. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia: Kebijakan. Kinerja Karyawan*. Edisi 1. Cetakan Kedelapan. Yogyakarta: BPFE.
- Wilson. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Erlangga.

Sumber undang-undang:

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.05/MEN/1996 tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :keselamatan dan kesehatan kerja.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dinyatakan bahwa upaya kesehatan dan keselamatan kerja (K3).